



Rencana Strategis 2015 - 2019

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan

*Rencana Strategis LPMP Sulawesi Selatan
2015 - 2019*



LPMP Sulawesi Selatan

‘Mewujudkan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai Standar Nasional Pendidikan yang Berlandaskan Semangat Gotong Royong di Provinsi Sulawesi Selatan’



LEMBAR PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)
SULAWESI SELATAN

Rencana Strategis (RENSTRA) LPMP SULAWESI SELATAN sebagai bahan
acuan target capaian program kerja Tahun 2015-2019

Kode Dokumen	:	
Revisi	:	1
Tanggal	:	29 Desember 2017
Diajukan oleh	:	Tim Reviu Renstra LPMP Sulawesi Selatan
Disetujui oleh	:	Kepala LPMP Sulawesi Selatan  Dr. H. Abdul Halim Muharram, M. Pd. NIP. 196507151994031002

KATA PENGANTAR

LPMP Sulawesi Selatan menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ke dalam Renstra LPMP. Renstra LPMP disusun berdasarkan reformasi perencanaan dan penganggaran untuk lebih memantapkan penerapan *performance-based budgeting* sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan.

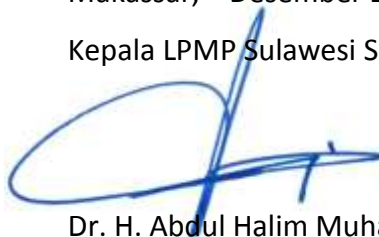
Rencana Strategis ini memuat rencana kerja dan program tahunan yang lebih operasional, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menentukan ketercapaian sasaran jangka menengah organisasi. Sedangkan rencana operasional digunakan untuk menentukan kegiatan yang lebih rinci yang merupakan bisnis proses dalam menghasilkan output. Selain itu Rencana Strategis juga memuat hal-hal yang terkait dengan perubahan internal yang tertuang di dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Perubahan ini terkait adanya proses bisnis internal LPMP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di LPMP Sulawesi Selatan. Rencana Strategis ini memuat rencana kerja dan sasaran kerja yang lebih operasional, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menentukan ketercapaian sasaran jangka menengah organisasi.

Rencana Strategis LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019 akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2015 – 2019 khususnya di bidang penjaminan mutu pendidikan. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi LPMP Sulawesi Selatan untuk menyusun (1) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (2) Rencana/Program kegiatan bidang penjaminan mutu pendidikan; (3) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan penjaminan mutu pendidikan; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Strategis juga diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif, termasuk memberi kritik, evaluasi dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan di bidang penjaminan mutu pendidikan selama lima tahun mendatang.

Makassar, Desember 2017

Kepala LPMP Sulawesi Selatan



Dr. H. Abdul Halim Muharram, M.Pd

NIP 19650715 199403 1 002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Paradigma Penjaminan Mutu Pendidikan	4
D. Kondisi Umum	5
E. Permasalahan Penjaminan Mutu Pendidikan	17
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN LPMP SULAWESI SELATAN	24
A. Visi LPMP Sulawesi Selatan	24
B. Misi LPMP Sulawesi Selatan	25
C. Tujuan Strategi LPMP Sulawesi Selatan	25
D. Sasaran Strategis LPMP Sulawesi Selatan	29
E. Tata Nilai	34
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A. Arah Kebijakan dan Strategi	38
B. Strategi LPMP Sulawesi Selatan	46
C. Kerangka Kelembagaan	52

BAB IV TARGET DAN INDIKATOR KINERJA

LPMP SULAWESI SELATAN	55
A. Target Kinerja	55
B. Kerangka Pendanaan	58
C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi	62
BAB V PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan	6
Tabel 1.2. Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan	7
Tabel 1.3. Jumlah Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan	8
Tabel 1.4. Jumlah Pengawas Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan	9
Tabel 1.5. Capaian SNP Jenjang SD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014	10
Tabel 1.6. Capaian SNP Jenjang SMP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014	11
Tabel 1.7. Capaian SNP Jenjang SMA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014	12
Tabel 1.8. Capaian SNP Jenjang SMK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014	13
Tabel 1.9. Capaian Uji Kompetensi Guru Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2014	14
Tabel 1.10. Capaian UKG Kepala Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015	14
Tabel 1.11. Capaian UKG Pengawas Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015	15
Tabel 1.12. Jumlah Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2013	17
Tabel 2.1. Misi LPMP Sulawesi Selatan	25
Tabel 2.2. Tujuan Strategis LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	25
Tabel 2.3. Keterkaitan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Kegiatan	31
Tabel 2.4. Nilai Masukan	35

Tabel 2.5. Nilai Proses	36
Tabel 2.6. Nilai Keluaran	37
Tabel 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pendidikan Dasar dan Menengah	38
Tabel 3.2. Strategi untuk Mencapai Tujuan Strategis LPMP Sulawesi Selatan	47
Tabel 3.3. Program, Kegiatan, dan Penanggung Jawab	50
Tabel 4.1. Target Kinerja	55
Tabel 4.2. Proyeksi Kebutuhan Pendanaan LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	59
Tabel 4.3. Rencana Pendanaan Berdasarkan Indikator Kinerja	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Capaian SNP Jenjang SD Provinsi Sulawesi Selatan	18
Gambar 1.2. Capaian SNP Jenjang SMP Provinsi Sulawesi Selatan	19
Gambar 1.3. Capaian SNP Jenjang SMA Provinsi Sulawesi Selatan	20
Gambar 1.4. Capaian SNP Jenjang SMK Provinsi Sulawesi Selatan	21
Gambar 1.5. Grafik Nilai Rata-Rata Hasil UKG Provinsi Sulawesi Selatan	23
Gambar 2.1. Tata Nilai LPMP Sulawesi Selatan	35
Gambar 3.1. Struktur Organisasi LPMP Sulawesi Selatan	53
Gambar 3.2. Proses Bisnis LPMP Sulawesi Selatan	54
Gambar 4.1. Proyeksi Kebutuhan Pendanaan LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Kemdikbud menetapkan arah pembangunan pendidikan pada empat periode rencana pembangunan bidang pendidikan jangka menengah. Periode 2005-2009 diarahkan pada peningkatan kapasitas dan modernitas sistem pendidikan. Periode 2010-2014 diarahkan pada peningkatan dan penguatan pelayanan pendidikan pada tingkat nasional. Periode 2015-2019 diarahkan pada penguatan daya saing pada tingkat regional. Periode 2020-2024 diarahkan pada penguatan daya saing pada tingkat Internasional.

Sejalan dengan amanat Konstitusi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam “Nawa Cita” berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan memberikan perhatian untuk (1) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (3) Melakukan revolusi karakter bangsa; (4) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Pengaturan operasional untuk mewujudkan Nawa Cita dan hak memperoleh pendidikan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, dan peraturan turunan lainnya, serta dalam visi, misi, maupun program-program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Strategis, dan program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015-2019, yang menjadi salah satu komponen penunjang pencapaian visi dan misi Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019.

LPMP Sulawesi Selatan menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ke dalam Renstra LPMP. Renstra LPMP disusun berdasarkan reformasi perencanaan dan penganggaran untuk

lebih memantapkan penerapan *performance-based budgeting* sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan.

Rencana Strategis ini memuat rencana kerja dan program tahunan yang lebih operasional, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menentukan ketercapaian sasaran jangka menengah organisasi. Sedangkan rencana operasional digunakan untuk menentukan kegiatan yang lebih rinci yang merupakan bisnis proses dalam menghasilkan output. Selain itu Rencana Strategis juga memuat hal-hal yang terkait dengan perubahan internal yang tertuang di dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Perubahan ini terkait adanya proses bisnis internal LPMP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di LPMP Sulawesi Selatan.

B. LANDASAN HUKUM

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
19. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019;
20. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

- 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Rencana StrategisK/L) 2015—2019;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
23. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan.
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
27. Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor127.1/M.PAN/4/2003 Tanggal 30 April 2003 tentang Persetujuan Pendirian Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.

C. PARADIGMA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Sejak tahun 2013, pemerintah telah mengembangkan Kurikulum 2013 sebagai pengganti Kurikulum 2006. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan pada tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan eksternal terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang berhubungan dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Sedangkan tantangan internal berkaitan tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum 2013 akan diterapkan secara bertahap pada

sejumlah sekolah yang ditunjuk dan diharapkan pada tahun ajaran 2019 seluruh sekolah telah mengimplementasikan Kurikulum 2013.

LPMP memiliki tugas untuk mengawal keberhasilan pemerintah dalam membangun sektor pendidikan terutama dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. Kegiatan ini diharapkan memberikan profil satuan pendidikan pada masing-masing daerah terhadap pemenuhan 8 standar pendidikan. Fasilitas pemenuhan SNP perlu dilakukan agar arah peningkatan kualitas pendidikan dan layanan pendidikan tidak menyimpang dari target tersebut.

Mengingat peningkatan mutu merupakan bagian penting dan strategis bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional, maka LPMP mempunyai keterkaitan dengan unit-unit kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah maupun dengan Dinas Pendidikan di Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan terhadap hal berikut :

1. Core Programme, yaitu kegiatan utama dalam rangka penjaminan mutu pendidikan
2. Extended Programme, yaitu program-program direktorat yang dapat disinkronkan dengan LPMP, antara lain Pendampingan K-13 dan monev, sekolah model/sekolah rujukan/sekolah Pembina, dll
3. Pengembangan kapasitas, yaitu 1). Kapasitas kelembagaan mengkaji ulang kebutuhan gedung disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang tugas dan fungsi LPMP, dan 2) Pengembangan kapasitas SDM, dengan melakukan pemetaan kompetensi, peningkatan kompetensi. Pembinaan karir, dan lain sebagainya.

D. KONDISI UMUM

1. DATA SEKOLAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Gambaran data sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan status sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan

NO	WILAYAH	TOTAL		
		JUMLAH	N	S
1	Kota Makassar	909	442	467
2	Kab. Bone	852	814	38
3	Kab. Gowa	578	508	70
4	Kab. Wajo	501	476	25
5	Kab. Bulukumba	464	442	22
6	Kab. Pangkajene Kepulauan	429	403	26
7	Kab. Luwu	419	360	59
8	Kab. Pinrang	409	387	22
9	Kab. Jeneponto	402	369	33
10	Kab. Maros	383	306	77
11	Kab. Tana Toraja	349	289	60
12	Kab. Luwu Utara	348	341	7
13	Kab. Soppeng	319	298	21
14	Kab. Takalar	312	292	20
15	Kab. Sidenreng Rappang	311	290	21
16	Kab. Sinjai	307	297	10
17	Kab. Toraja Utara	299	256	43
18	Kab. Enrekang	288	274	14
19	Kab. Barru	253	243	10
20	Kab. Luwu Timur	218	189	29
21	Kab. Kepulauan Selayar	209	202	7
22	Kab. Bantaeng	199	178	21
23	Kota Pare-Pare	134	101	33
24	Kota Palopo	129	91	38
Total		9.021	7.848	1.173

Gambaran data sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan jenjang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.2. Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan

No	Wilayah	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1	Kota Makassar	490	204	126	88	1
2	Kab. Bone	670	119	38	23	2
3	Kab. Gowa	411	107	43	15	2
4	Kab. Wajo	397	73	17	14	0
5	Kab. Bulukumba	349	71	22	22	0
6	Kab. Pangkajene Kepulauan	301	87	28	13	0
7	Kab. Luwu	270	100	24	23	2
8	Kab. Pinrang	322	55	15	17	0
9	Kab. Jeneponto	287	73	21	20	1
10	Kab. Maros	260	72	30	20	1
11	Kab. Tana Toraja	220	81	19	29	0
12	Kab. Luwu Utara	245	71	19	12	1
13	Kab. Soppeng	256	38	12	12	1
14	Kab. Takalar	236	43	22	10	1
15	Kab. Sidenreng Rappang	234	49	17	11	0
16	Kab. Sinjai	241	41	16	9	0
17	Kab. Toraja Utara	186	75	15	23	0
18	Kab. Enrekang	218	45	17	8	0
19	Kab. Barru	197	38	9	8	1
20	Kab. Luwu Timur	154	41	19	4	0
21	Kab. Kepulauan Selayar	139	50	11	9	0
22	Kab. Bantaeng	145	35	8	11	0
23	Kota Pare-Pare	89	23	9	13	0
24	Kota Palopo	76	22	12	19	0
Total		6.393	1.613	569	433	13

2. DATA GURU DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Gambaran data guru di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

Tabel 1.3. Jumlah Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan

No	Wilayah	Jenjang						Jumlah
		TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	
1	Kab. Bantaeng	223	2254	507	251	248	14	3497
2	Kab. Barru	312	2099	752	241	166		3570
3	Kab. Bone	1454	5269	1699	888	259	28	9597
4	Kab. Bulukumba	1174	3532	1214	523	351	41	6835
5	Kab. Enrekang	349	2378	753	458	240	13	4191
6	Kab. Gowa	758	4211	1529	668	440	47	7653
7	Kab. Jeneponto	325	3148	992	337	252	8	5062
8	Kab. Selayar	404	1661	691	264	201	21	3242
9	Kab. Luwu	562	3114	1355	592	340	7	5970
10	Kab. Luwu Timur	467	1928	765	499	101	14	3774
11	Kab. Luwu Utara	479	2792	1084	556	253		5164
12	Kab. Maros	353	2584	958	501	188		4584
13	Kab. Pangkep	235	3071	1152	516	321	41	5336
14	Kab. Pinrang	501	3378	1171	394	414	13	5871
15	Kab. Sidrap	528	2324	950	435	276		4513
16	Kab. Sinjai	349	2733	901	543	213	9	4748
17	Kab. Soppeng	307	2573	816	364	339	22	4421
18	Kab. Takalar	542	2707	897	533	302	11	4992
19	Kab. Tana Toraja	182	2108	1020	360	448	32	4150
20	Kab. Toraja Utara	132	2105	1036	328	471	10	4082
21	Kab. Wajo	644	3619	1099	510	228	5	6105
22	Kota Makassar	1543	5997	2972	1900	1434	257	14103
23	Kota Palopo	300	1117	546	392	468	32	2855
24	Kota Parepare	305	1236	554	296	379	12	2782
Total		12428	67938	25413	12349	8332	637	127097

3. DATA PENGAWAS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Gambaran data pengawas di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

Tabel 1.4. Jumlah Pengawas Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan

NO	KAB/KOTA	PENGAWAS			TOTAL
		SD	SMP	SMA/SMK	
1	Sinjai	22	13	9	44
2	Bantaeng	25	17	11	53
3	Bulukumba	43	46		89
4	Jeneponto	42	11	7	60
5	Takalar	48	19	21	88
6	Pangkep	30	12	11	53
7	Parepare	9	6	8	23
8	Selayar	26	9	6	41
9	Sidrap	33			33
10	Soppeng	42	8	15	65
11	Tana Toraja	22	17	13	52
12	Toraja Utara	26	7	10	43
13	Luwu Utara	38	18	8	64
14	Enrekang	19	5	3	27
15	Barru	19	5		24
16	Pinrang	29	14	16	59
17	Makassar	75	19		94
18	Bone	99	16	18	133
19	Wajo	40	40		80
20	Gowa	35	10	8	53
21	Maros	36	25	5	66
22	Luwu Timur	19	8		27
23	Palopo	7	17		24
24	Luwu	62	13	16	91
Total					1386

4. CAPAIAN SNP

Gambaran capaian SNP satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

a. JENJANG SD

**Tabel 1.5. Capaian SNP Jenjang SD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2014**

KAB/KOTA	SKL	ISI	PROSES	PENILAIAN	PTK	PENGELOLAAN
Kab. Maros	5.02	5.93	5.28	6.82	6.02	6.51
Kab. Pangkajene Kepulauan	5.45	6.22	5.77	7.29	6.62	6.85
Kab. Gowa	5.08	5.74	5.32	6.93	6.19	6.52
Kab. Takalar	4.94	5.18	4.63	6.42	5.5	6.14
Kab. Jeneponto	4.88	4.9	4.26	5.91	4.93	5.56
Kab. Barru	5.1	5.82	5.3	7.07	6.28	6.74
Kab. Bone	4.88	5.92	5.48	7.18	6.21	6.63
Kab. Wajo	4.94	6.04	5.37	7.03	6.18	6.6
Kab. Soppeng	5.03	5.86	5.42	6.99	6.31	6.73
Kab. Bantaeng	5.22	5.95	5.38	7.01	6.3	6.8
Kab. Bulukumba	5.23	5.81	5.21	6.99	6.14	6.65
Kab. Sinjai	5.22	5.82	5.36	7.04	6.39	6.73
Kab. Kepulauan Selayar	5.13	6.02	5.54	7.15	6.52	6.82
Kab. Pinrang	5.44	6.27	5.74	7.44	6.71	6.86
Kab. Sidenreng Rappang	5.54	6.5	6.13	7.52	6.89	7.07
Kab. Enrekang	4.96	5.87	5.45	7	6.35	6.7
Kab. Luwu	5.3	5.99	5.45	7.11	6.42	6.63
Kab. Tana Toraja	5.25	6.21	5.43	7.06	6.28	6.64
Kab. Luwu Utara	4.85	5.38	4.71	6.39	5.5	6.19
Kab. Luwu Timur	6.21	6.89	6.54	7.86	7.49	7.37
Kab. Toraja Utara	5.12	5.98	5.25	6.94	6.24	6.61
Kota Makassar	5.19	5.52	5.16	6.78	6	6.34

KAB/KOTA	SKL	ISI	PROSES	PENILAIAN	PTK	PENGELOLAAN
Kota Pare Pare	5.94	6.6	6.37	7.57	7.08	7.38
Kota Palopo	5.6	6.06	5.63	7.22	6.67	6.87
Provinsi Sulawesi Selatan	5.16	5.88	5.37	7	6.22	6.6

b. JENJANG SMP

**Tabel 1.6. Capaian SNP Jenjang SMP Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2014**

Kab/Kota	SKL	Isi	Proses	Penilaian	PTK	Pengelolaan
Kab. Maros	5.19	7.01	5.64	6.81	6.08	6.54
Kab. Pangkajene Kepulauan	5.03	6.68	5.28	6.45	5.68	6.04
Kab. Gowa	4.88	6.63	5.27	6.31	5.61	5.84
Kab. Takalar	4.55	6.41	5.15	6.66	5.61	6.13
Kab. Jeneponto	4.64	6.37	4.77	6.15	4.98	5.75
Kab. Barru	4.74	6.89	5.25	6.86	6.11	6.65
Kab. Bone	4.92	7.12	5.55	7	6.09	6.5
Kab. Wajo	5.06	6.93	5.43	6.77	5.89	6.3
Kab. Soppeng	5.42	7.08	5.73	7.19	6.28	6.78
Kab. Bantaeng	4.31	6.45	4.79	6.59	5.94	6.51
Kab. Bulukumba	5.41	7.03	5.78	7.1	6.54	6.78
Kab. Sinjai	5.71	7.6	6.19	7.25	6.76	6.61
Kab. Kepulauan Selayar	4.8	7	5.47	6.84	5.91	6.43
Kab. Pinrang	4.91	6.75	5.4	6.93	6.43	6.76
Kab. Sidenreng Rappang	5.77	7.53	5.97	7.07	6.36	6.71
Kab. Enrekang	4.69	7.55	5.92	7.34	7.05	6.96
Kab. Luwu	4.97	6.97	5.27	6.72	5.94	6.27
Kab. Tana Toraja	4.89	7.41	5.84	7.28	6.75	6.89
Kab. Luwu Utara	4.55	6.43	4.79	6.52	5.91	6.21
Kab. Luwu Timur	5.83	7.48	6.08	7.3	7.09	7.07
Kab. Toraja Utara	5.19	7.01	5.68	6.99	6.34	6.56
Kota Makasar	5.59	6.88	5.56	6.5	5.67	6.1

Kab/Kota	SKL	Isi	Proses	Penilaian	PTK	Pengelolaan
Kota Pare Pare	5.47	7.16	5.6	7.03	6.18	6.63
Kota Palopo	5.62	7.15	6.02	7.05	6.46	6.88
Provinsi Sulawesi Selatan	5.08	6.94	5.48	6.8	6.06	6.41

c. JENJANG SMA

**Tabel 1.7. Capaian SNP Jenjang SMA Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2014**

Kab/kota	SKL	Isi	Proses	Penilaian	PTK	Pengelolaan
Kab. Maros	5.32	6.95	5.37	7.08	5.89	6.26
Kab. Pangkajene Kepulauan	5.25	6.63	5.36	6.32	5.42	5.98
Kab. Gowa	4.97	6.32	4.78	6.3	5.27	5.9
Kab. Takalar	4.96	7.19	5.61	7.31	5.66	6.64
Kab. Jeneponto	5.19	6.49	4.68	6.49	5.16	5.74
Kab. Barru	4.7	6.28	4.8	6.46	5.42	5.89
Kab. Bone	5.38	7.02	5.21	7.03	5.99	6.25
Kab. Wajo	5.2	6.99	5.43	7.27	6.1	6.67
Kab. Soppeng	5.76	7.09	5.14	6.7	5.53	6.48
Kab. Bantaeng	5.64	7.07	5.87	7.14	5.63	6.59
Kab. Bulukumba	5.67	7.25	5.49	7.38	6.14	6.78
Kab. Sinjai	5.61	7.31	5.67	7.19	6.23	6.36
Kab. Kepulauan Selayar	4.65	6.3	5.04	6.55	5.57	5.74
Kab. Pinrang	5.55	6.71	5.21	6.83	6.37	6.48
Kab. Sidenreng Rappang	5.04	7.08	5.44	7.04	6.01	6.33
Kab. Enrekang	4.96	6.85	5.14	7.32	6.31	6.93
Kab. Luwu	5.35	6.95	5.45	7.14	5.98	6.55
Kab. Tana Toraja	5.19	8.03	6.03	7.99	7.04	7.35
Kab. Luwu Utara	4.71	6.61	5.02	6.76	6.1	6.21
Kab. Luwu Timur	5.46	7.06	5.48	7.45	6.5	6.77
Kab. Toraja Utara	5.45	7.06	5.48	7.81	6.79	7.49

Kab/kota	SKL	Isi	Proses	Penilaian	PTK	Pengelolaan
Kota Makasar	5.31	6.73	5.33	6.29	5.23	5.86
Kota Pare Pare	5.64	7.38	5.87	6.75	6.17	6.47
Kota Palopo	5.98	7.78	6.25	7.26	6.28	6.88
Provinsi Sulawesi Selatan	5.27	6.9	5.33	6.85	5.79	6.3

d. JENJANG SMK

**Tabel 1.8. Capaian SNP Jenjang SMK Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2014**

Kab/kota	SKL	Isi	Proses	Penilaian	PTK	Pengelolaan
Kab. Maros	5.61	6.99	5.86	5.96	4.69	5.21
Kab. Pangkajene Kepulauan	4.87	5.9	4.65	5.99	5.5	6.04
Kab. Gowa	4.45	5.35	4.29	5.64	5.09	5.86
Kab. Takalar	4.87	6.28	5.25	6.17	5.53	5.9
Kab. Jeneponto	4.39	6.48	4.81	6.26	5.85	5.95
Kab. Barru	4.43	6.1	4.91	6.18	5.69	5.87
Kab. Bone	4.27	6.07	4.73	5.9	4.91	5.47
Kab. Wajo	4.57	6.48	4.99	6.74	5.23	6.87
Kab. Soppeng	4.9	6.19	5.1	6.48	6.06	6.44
Kab. Bantaeng	5.01	6.93	5.71	6.8	6.06	6.33
Kab. Bulukumba	4.83	7.2	5.53	7.08	6.56	6.78
Kab. Sinjai	4.34	6.59	5.15	6.97	6.05	6.75
Kab. Kepulauan Selayar	4.51	6.39	4.56	6.2	5.56	6.15
Kab. Pinrang	5.13	6.25	4.97	5.74	4.92	5.61
Kab. Sidenreng Rappang	4.69	6.86	5.15	6.67	5.55	6.63
Kab. Enrekang	5.06	6.87	5.49	6.47	5.22	5.63
Kab. Luwu	5.24	6.3	5.06	5.68	5.24	5.38
Kab. Tana Toraja	4.56	6.29	5.05	6.29	5.42	6.05
Kab. Luwu Utara	4.69	5.96	4.03	6.25	5.45	5.97
Kab. Luwu Timur	5.28	6.42	5.45	7.03	6.07	6.27

Kab/kota	SKL	Isi	Proses	Penilaian	PTK	Pengelolaan
Kab. Toraja Utara	6.01	7.42	5.86	7.15	6.85	6.64
Kota Makasar	5.07	6.16	4.92	5.95	5.15	5.73
Kota Pare Pare	5.39	6.79	5.65	6.36	5.62	6.18
Kota Palopo	4.89	6.37	4.94	5.68	4.98	5.42
Provinsi Sulawesi Selatan	4.95	6.42	5.08	6.22	5.48	5.96

5. CAPAIAN UKG

a. UKG GURU

**Tabel 1.9. Capaian Uji Kompetensi Guru Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2012 – 2014**

JENJANG	RERATA		
	2012	2013	2014
TK	39.16	46.40	48.43
SD	38.39	41.11	41.84
SMP	44.87	48.76	46.97
SLB	36.56	39.27	35.45
SMA	42.68	50.25	48.63
SMK	45.26	48.50	46.31
PROVINSI SULAWESI SELATAN	41.16	45.71	44.60

b. UKG KEPALA SEKOLAH

**Tabel 1.10. Capaian UKG Kepala Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015**

NO.	KAB/KOTA	RERATA
1	KAB. BANTAENG	43.76
2	KAB. BARRU	41.35
3	KAB. BONE	39.91

NO.	KAB/KOTA	RERATA
4	KAB. BULUKUMBA	43.49
5	KAB. ENREKANG	45.99
6	KAB. GOWA	42.71
7	KAB. JENEPONTO	37.11
8	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	43.93
9	KAB. LUWU	39.6
10	KAB. LUWU TIMUR	43.85
11	KAB. LUWU UTARA	41.83
12	KAB. MAROS	43.27
13	KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	41.01
14	KAB. PINRANG	41.85
15	KAB. SIDENRENG RAPPANG	41.32
16	KAB. SINJAI	42.26
17	KAB. SOPPENG	43.96
18	KAB. TAKALAR	40.1
19	KAB. TANA TORAJA	43.56
20	KAB. TORAJA UTARA	42.54
21	KAB. WAJO	44.4
22	KOTA MAKASAR	43.4
23	KOTA PALOPO	43.5
24	KOTA PARE PARE	46.13
PROVINSI SULAWESI SELATAN		42.24

c. UKG PENGAWAS SEKOLAH

**Tabel 1.11. Capaian UKG Pengawas Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015**

NO.	KAB/KOTA	RERATA
1	KAB. BANTAENG	41.94
2	KAB. BARRU	37.33

NO.	KAB/KOTA	RERATA
3	KAB. BONE	37.46
4	KAB. BULUKUMBA	39.56
5	KAB. ENREKANG	44.86
6	KAB. GOWA	45.06
7	KAB. JENEPONTO	35.51
8	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	39.22
9	KAB. LUWU	36.72
10	KAB. LUWU TIMUR	41.75
11	KAB. LUWU UTARA	38.64
12	KAB. MAROS	40.41
13	KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	40.73
14	KAB. PINRANG	40.46
15	KAB. SIDENRENG RAPPANG	38.45
16	KAB. SINJAI	39.9
17	KAB. SOPPENG	42.04
18	KAB. TAKALAR	34.59
19	KAB. TANA TORAJA	39.5
20	KAB. TORAJA UTARA	36.87
21	KAB. WAJO	40.74
22	KOTA MAKASAR	38.35
23	KOTA PALOPO	40.21
24	KOTA PARE PARE	40.87
PROVINSI SULAWESI SELATAN		37.92

6. KURIKULUM 2013

Jumlah sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 untuk setiap jenjang pendidikan pada tahun 2013 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.12. Jumlah Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013
Tahun 2013**

NO	JENJANG	JUMLAH
1	SD	132
2	SMP	63
3	SMA	35
4	SMK	30
JUMLAH		260

E. PERMASALAHAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

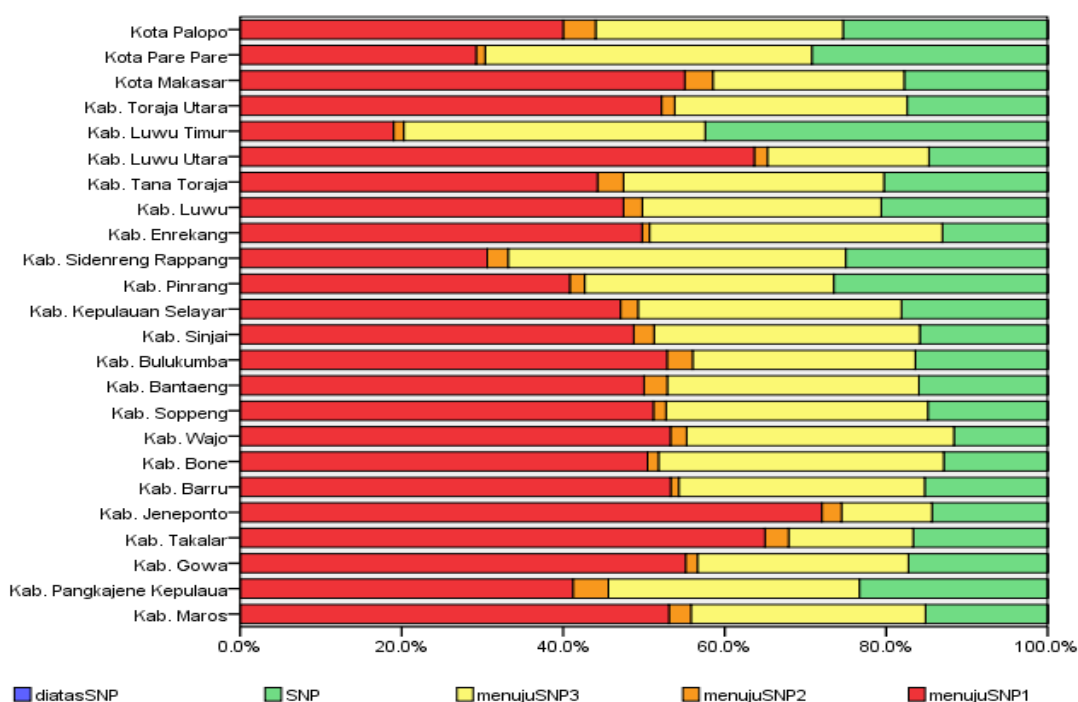
Dalam upaya penguatan jaminan kualitas pendidikan dan meningkatkan kapasitas daerah, pemberdayaan LPMP sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan sangat penting untuk dilakukan. Berbagai permasalahan penjaminan mutu pendidikan diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian Standar Nasional Pendidikan

Capaian Standar Nasional Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data hasil Evaluasi Diri Sekolah tahun 2014 masih rendah. Hal ini ditunjukkan pada capaian setiap jenjang pendidikan sebagai berikut:

a. Jenjang SD

Jumlah sekolah jenjang SD berdasarkan kategori capaian SNP sebagai berikut:



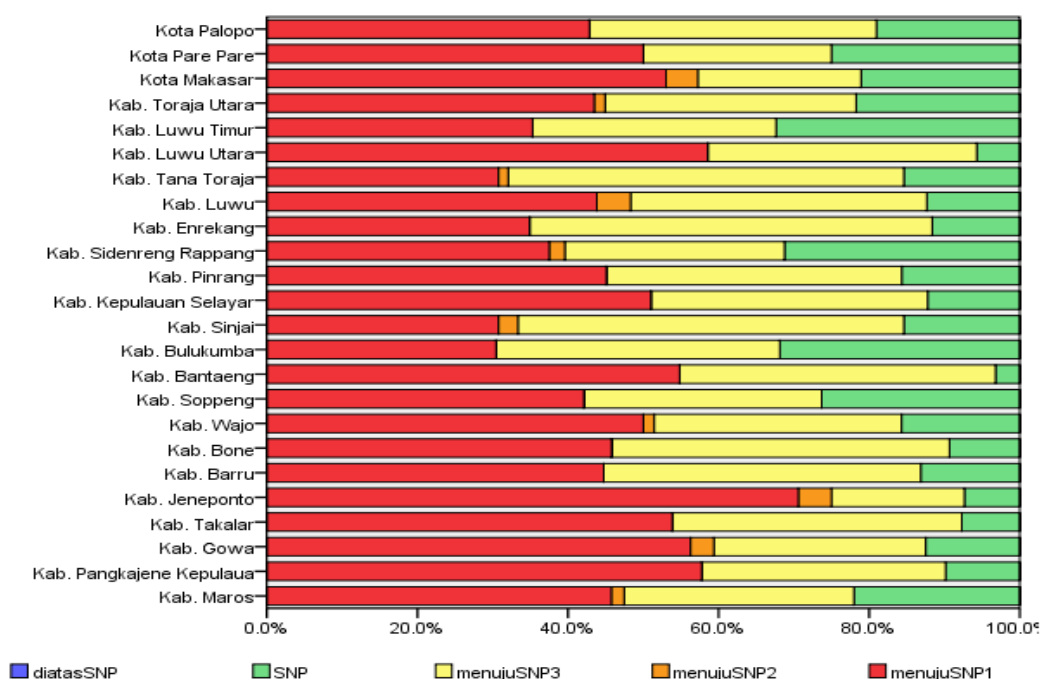
Gambar 1.1. Capaian SNP Jenjang SD Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar di atas menunjukkan bahwa capaian SNP untuk jenjang sekolah dasar pada sebagian besar kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi pada kategori “Menuju SNP 1” dan “menuju SNP 3”. Belum ada sekolah dasar di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki capaian “Di Atas SNP”. Adapun permasalahan mutu pendidikan berdasarkan indikator Standar Nasional Pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar dengan capaian paling rendah antara lain Rendahnya prestasi siswa/lulusan; Kontribusi komite yang kurang efektif terhadap peningkatan mutu sekolah; Proses belajar mengajar belum sepenuhnya mengembangkan kreatifitas peserta didik; Proses belajar mengajar belum mengembangkan kemampuan berkomunikasi efektif dan santun; Proses belajar mengajar belum efektif dan efisien untuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku; Lulusan kurang mampu berkomunikasi efektif dan santun; Materi ajar yang tidak sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan kurang relevan dengan kebutuhan siswa; Lulusan kurang mampu berpikir logis dan sistematis; dan

peningkatan kompetensi PTK yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.

b. Jenjang SMP

Jumlah sekolah jenjang SMP berdasarkan kategori capaian SNP sebagai berikut:



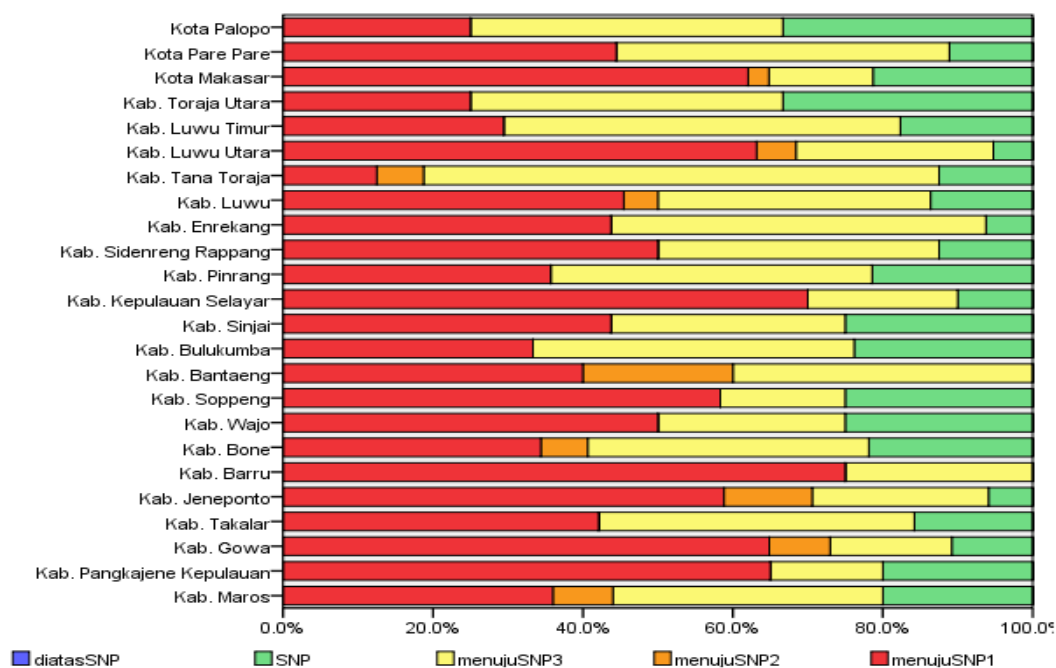
Gambar 1.2. Capaian SNP Jenjang SMP Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar di atas menunjukkan bahwa capaian SNP untuk jenjang sekolah menengah pertama pada sebagian besar kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi pada kategori “Menuju SNP 1” dan “menuju SNP 3”. Belum ada sekolah dasar di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki capaian “Di Atas SNP”. Adapun permasalahan mutu pendidikan berdasarkan indikator Standar Nasional Pendidikan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan capaian paling rendah antara lain Rendahnya prestasi siswa/lulusan; Kontribusi komite yang kurang efektif terhadap peningkatan mutu sekolah, Proses belajar mengajar yang belum mengembangkan kreatifitas peserta didik; Proses belajar mengajar yang belum mengembangkan kemampuan berkomunikasi efektif dan santun;

Penilaian belum menerapkan aspek keadilan, transparansi, dan akuntabilitas; Lulusan kurang mampu berpikir logis dan sistematis; Pelaksanaan proses belajar mengajar yang belum efektif dan efisien untuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku; Lulusan kurang mampu berkomunikasi efektif dan santun; Peningkatan kompetensi PTK yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah; dan Materi ajar yang kurang relevan dengan kebutuhan siswa.

c. Jenjang SMA

Jumlah sekolah jenjang SMA berdasarkan kategori capaian SNP sebagai berikut:



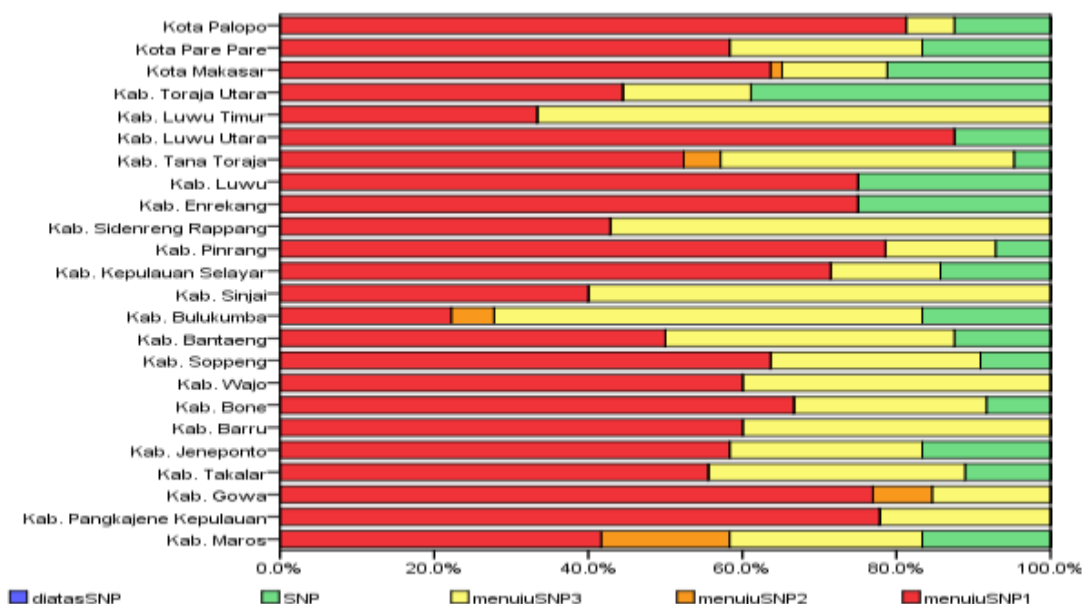
Gambar 1.3. Capaian SNP Jenjang SMA Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar di atas menunjukkan bahwa capaian SNP untuk jenjang sekolah menengah atas pada sebagian besar kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi pada kategori “Menuju SNP 1” dan “menuju SNP 3”. Belum ada sekolah dasar di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki capaian “Di Atas SNP”. Adapun permasalahan mutu pendidikan berdasarkan indikator Standar Nasional Pendidikan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas dengan capaian paling rendah antara lain Proses belajar

mengajar belum mengembangkan kreatifitas peserta didik; Rendahnya prestasi siswa/lulusan; Proses belajar mengajar belum mengembangkan kemampuan berkomunikasi efektif dan santun; Lulusan kurang mampu berpikir logis dan sistematis; Pelaksanaan proses belajar mengajar belum dilakukan secara efektif dan efisien untuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku; Penilaian yang dilakukan belum menerapkan aspek keadilan, transparansi, dan akuntabilitas; Peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekolah; Lulusan kurang mampu berkomunikasi secara efektif dan santun; Materi ajar kurang relevan dengan kebutuhan siswa; dan Lulusan belum memiliki pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural.

d. Jenjang SMK

Jumlah sekolah jenjang SMK berdasarkan kategori capaian SNP sebagai berikut:



Gambar 1.4. Capaian SNP Jenjang SMK Provinsi Sulawesi Selatan

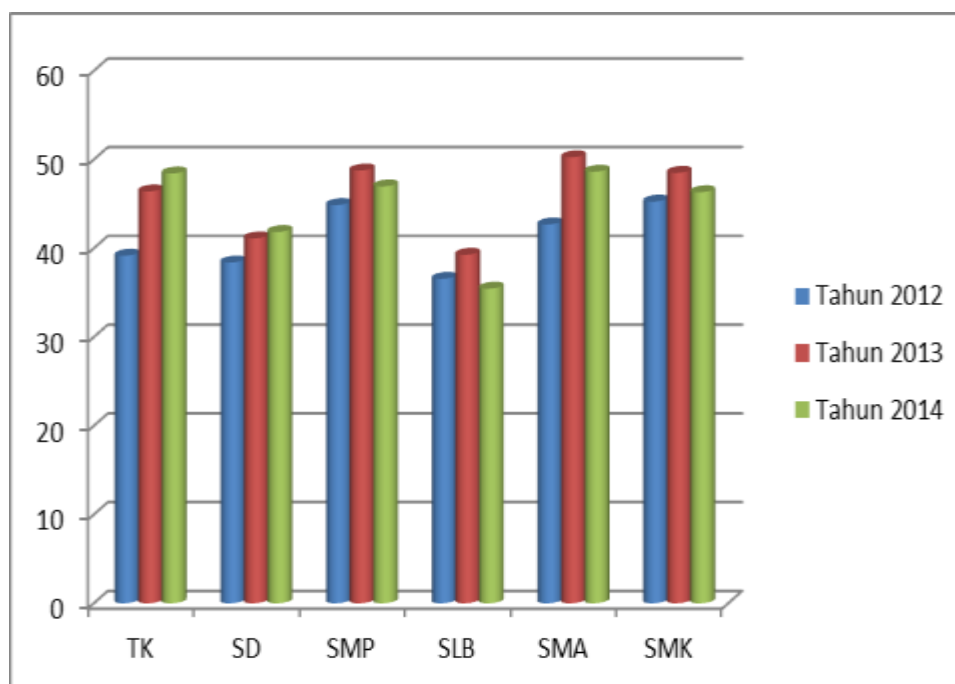
Gambar di atas menunjukkan bahwa capaian SNP untuk jenjang sekolah menengah kejuruan pada sebagian besar kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi pada kategori “Menuju SNP 1” dan “menuju

SNP 3". Belum ada sekolah dasar di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki capaian "Di Atas SNP". Adapun permasalahan mutu pendidikan berdasarkan indikator Standar Nasional Pendidikan untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan dengan capaian paling rendah antara lain Proses belajar mengajar kurang mengembangkan kreatifitas peserta didik; Proses belajar mengajar belum mengembangkan kemampuan berkomunikasi efektif dan santun; Penilaian yang dilakukan belum menerapkan aspek keadilan, transparansi, dan akuntabilitas; Rendahnya prestasi siswa/lulusan; Lulusan kurang mampu berkomunikasi secara efektif dan santun; Lulusan kurang mampu berpikir logis dan sistematis; Proses belajar mengajar belum dilakukan secara efektif dan efisien untuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku; Peningkatan kompetensi PTK belum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekolah; Materi ajar kurang relevan dengan kebutuhan siswa; dan Proses belajar mengajar kurang mengembangkan budaya dan kemandirian belajar.

Secara keseluruhan, sebagian besar sekolah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan masih berada pada capaian Standar Nasional Pendidikan kategori "Menuju SNP 1" dan "Menuju SNP 3" serta belum ada sekolah yang berada pada kategori capaian "di Atas SNP". Hal ini menunjukkan rendahnya capaian Standar Nasional Pendidikan untuk semua jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Capaian Nilai Uji Kompetensi Guru

Berdasarkan hasil uji kompetensi guru yang telah dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengukur aspek kompetensi pedagogik dan profesional, diketahui bahwa perolehan rata-rata nilai kompetensi Guru di Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan pada grafik berikut:



Gambar 1.5. Grafik Nilai Rata-Rata Hasil UKG Provinsi Sulawesi Selatan

Grafik di atas menunjukkan rata-rata nilai hasil Uji Kompetensi Guru Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012- 2014. Nilai rata-rata hasil uji kompetensi guru masih sangat rendah yaitu di bawah 50 dari nilai 100 yang harus dicapai.

3. Pelaksanaan Kurikulum 2013

Jumlah sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 dibandingkan dengan jumlah keseluruhan sekolah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat sedikit. Pada tahun 2013 hanya sebanyak 260 sekolah atau sekitar 3% dari jumlah sekolah di Sulawesi Selatan yang telah melaksanakan Kurikulum 2013. Percepatan besaran jumlah sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 serta kualitas pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 menjadi fokus penjaminan mutu pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

BAB II**VISI, MISI, DAN TUJUAN LPMP SULAWESI SELATAN****A. Visi LPMP Sulawesi Selatan**

Pembangunan Indonesia pada masa depan bersandar pada visi Indonesia jangka panjang, yaitu terwujudnya negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia modern yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Insan cerdas dan insan kompetitif melandasi penetapan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis 2015-2019, yaitu ***“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”***. Mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan visi yang akan diemban tersebut, ditetapkanlah Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu ***“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”***

Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melandasi visi LPMP Sulawesi Selatan sebagai berikut ***“Terwujudnya Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai Standar Nasional Pendidikan yang Berlandaskan Semangat Gotong Royong di Provinsi Sulawesi Selatan”***.

Hal yang perlu diperjelas dalam visi tersebut, yaitu gotong royong agar tidak menimbulkan beragam tafsir. Gotong royong yang dimaksud dalam visi adalah salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa

turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong. Berlandaskan semangat gotong royong akan memposisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai suatu gerakan yang dicirikan antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha, dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga pendidikan seperti sekolah.

B. Misi LPMP Sulawesi Selatan

Dalam rangka mencapai visi ini, ada empat misi yang harus diemban oleh LPMP Sulawesi Selatan dalam rentang waktu 2015-2019, yaitu:

Tabel 2.1. Misi LPMP Sulawesi Selatan

Kode	Misi
M1	Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan;
M2	Mengembangkan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan;
M3	Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan pendidikan dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan
M4	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan

C. Tujuan Strategis LPMP Sulawesi Selatan

Tujuan strategis LPMP Sulawesi Selatan tahun 2015-2019 mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan strategis tersebut adalah :

Tabel 2.2. Tujuan Strategis LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

KODE	TUJUAN STRATEGIS
TS1	Meningkatnya nilai capaian SNP pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulsel

TS2	Meningkatnya kualitas tata kelola LPMP Sulsel
-----	---

Tujuan strategis ini untuk memastikan satuan pendidikan di wilayah provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu melalui penerapan penjaminan mutu di satuan pendidikan tanpa ada diskriminasi akses dan geografis. Kegiatan yang dilaksanakan LPMP Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2015-2019 diarahkan untuk mencapai tujuan strategis ini.

Tujuan strategis pertama (TS1) Meningkatnya nilai capaian SNP pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulsel merupakan tujuan atas pelaksanaan misi LPMP Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. (M1) Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan,
2. (M2) Mengembangkan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan, dan
3. (M3) Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan pendidikan dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan strategis kedua (TS2) merupakan tujuan atas pelaksanaan misi keempat (M4) LPMP Sulawesi Selatan yaitu meningkatkan tata kelola birokrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan.

Penjabaran dari tujuan strategis tersebut adalah :

1. Meningkatnya nilai capaian SNP pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulsel.

Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menaikkan tingkat kecerdasan

kehidupan bangsa melalui pendidikan. Salah satu jenis kegiatan penjaminan mutu pendidikan adalah pemetaan mutu satuan pendidikan.

Berdasarkan tugas dan fungsi penjaminan mutu pendidikan, LPMP melaksanakan pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah melalui serangkaian kegiatan yang salah satu tahapan adalah penyusunan instrumen. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan peta mutu yang valid (sahih) dan reliabel (dapat dipercaya). Pemetaan ini diharapkan dapat berfungsi ganda sebagai acuan dalam melakukan evaluasi diri di tingkat sekolah serta sekaligus memetakan mutu pendidikan pada tingkat pusat maupun daerah.

Supervisi pendidikan merupakan tindak lanjut dari hasil pemetaan mutu dimana satuan pendidikan yang masih berada di bawah SNP memerlukan pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan mutu pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu pembelajaran pada khususnya melalui konsultasi, *mentoring and coaching*, dan kegiatan sejenis.

Supervisi pendidikan merupakan tindak lanjut dari hasil pemetaan mutu dimana satuan pendidikan yang masih berada di bawah SNP memerlukan pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan mutu pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu pembelajaran pada khususnya melalui konsultasi, *mentoring and coaching*, dan kegiatan sejenis.

Selain kegiatan supervisi pendidikan, hasil pemetaan mutu juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan fasilitasi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah dalam ekosistem pendidikan. Fasilitasi yang dimaksud adalah proses mempermudah, melayani, memperlancar sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Meningkatkan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan untuk mencapai SNP dengan cara mentransfer pengetahuan dan keterampilan.

Penjaminan mutu menjadi suatu hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang diharapkan menjadi ujung tombak

peningkatan sumber daya manusia. Setiap wilayah memiliki sumber daya dan karakteristik tertentu yang mempengaruhi mutu pendidikan di daerah tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk khusus penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh LPMP Sulawesi Selatan pada satuan pendidikan termasuk satuan pendidikan di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan adanya pemerataan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan.

Adapun indikator kinerja LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 adalah:

- a. 100 % satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah dipetakan mutunya
- b. 95% satuan pendidikan dasar dan menengah yang meningkat indeks efektifitasnya
- c. 80% satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
- d. 6,6% SD yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan
- e. 6,3% SMP yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan
- f. 13% SMA yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan
- g. 12,8 SMK yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan
- h. 24 kabupaten/kota telah melaksanakan program kemitraan penjaminan mutu pendidikan
- i. Tersedianya 3 layanan sistem pendataan dan informasi pendidikan

2. Meningkatnya kualitas tata kelola LPMP Sulsel

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja bertujuan untuk menjaga agar, (a) mutu laporan keuangan tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (b) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program

kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat provinsi.

Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi LPMP Sulawesi Selatan yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan.

Adapun indikator kinerja LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 untuk mencapai tujuan strategis kedua (TS2) adalah:

- a. 95% data Pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan
- b. Nilai minimal SAKIP LPMP SulSel adalah 85

D. SASARAN STRATEGIS LPMP SULAWESI SELATAN

Untuk mengetahui ketercapaian masing-masing tujuan strategis yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran strategis (SS) yang harus dicapai sampai tahun 2019. Pada setiap sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang menjadi target yang harus dicapai dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah selama 5 tahun kedepan. Adapun sasaran strategis kegiatan LPMP Sulawesi Selatan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.

Sasaran strategis ini adalah sasaran untuk mencapai tujuan strategis kesatu (TS1) yaitu meningkatnya nilai capaian SNP pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulsel. Layanan penjaminan mutu pendidikan yang diberikan oleh LPMP Sulawesi Selatan dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan diawali dengan kegiatan pemetaan mutu pendidikan,

fasilitasi dan supervisi dalam rangka peningkatan capaian SNP. Indikator kinerja dari sasaran ini terdiri atas dua belas indikator.

2. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui pengembangan model penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis ini adalah sasaran untuk mencapai tujuan strategis kesatu (TS1) yaitu meningkatnya nilai capaian SNP pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulsel. Melalui sasaran strategis ini diharapkan selama tahun 2015-2019 dapat dikembangkan suatu model penjaminan mutu pendidikan yang dapat diterapkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Indikator kinerja kegiatan dari sasaran ini ada empat indikator

3. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang dikdasmen melalui kemitraan penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis ini adalah sasaran untuk mencapai tujuan strategis kesatu (TS1) yaitu meningkatnya nilai capaian SNP pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulsel. Melalui sasaran strategis ini diharapkan selama tahun 2015-2019 terjadi peningkatan layanan kemitraan dengan stakeholder pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator kinerja kegiatan dari sasaran ini terdiri atas satu indikator.

4. Tersedianya sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah

Sasaran strategis ini adalah sasaran untuk mencapai tujuan strategis kesatu (TS1) yaitu meningkatnya nilai capaian SNP pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulsel. Melalui sasaran strategis ini diharapkan terjadi peningkatan informasi mutu pendidik dan tenaga kependidikan dalam hal jumlah layanan. Indikator kinerja kegiatan dari sasaran ini adalah meningkatnya jumlah layanan sistem pendataan dan informasi pendidikan dasar dan menengah.

5. Terwujudnya tata kelola LPMP Sulawesi Selatan yang baik

Sasaran strategis ini adalah sasaran untuk mencapai tujuan strategis kedua (TS2) yaitu meningkatnya kualitas tata kelola LPMP Sulsel. Melalui sasaran strategis ini diharapkan terjadi peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan diharapkan dapat mewujudkan birokrasi LPMP Sulawesi Selatan yang dapat menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien. *Performace* atau kinerja pengelola kegiatan menjadi sangat penting bagi terciptanya tata kelola yang diinginkan tersebut.

Tabel berikut ini menunjukkan kaitan antara tujuan strategis (TS), sasaran strategis (SS) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Melalui tabel tersebut terlihat IKK yang merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan.

Tabel 2.3. Keterkaitan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Kegiatan

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya nilai capaian SNP pendidikan dasar dan menengah di provinsi Sulsel	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1. 100% SD yang telah dipetakan mutunya 2. 95% SD yang meningkat indeks efektivitasnya 3. 100% SMP yang telah dipetakan mutunya 4. 95% SMP yang meningkat indeks efektivitasnya 5. 100% SMA

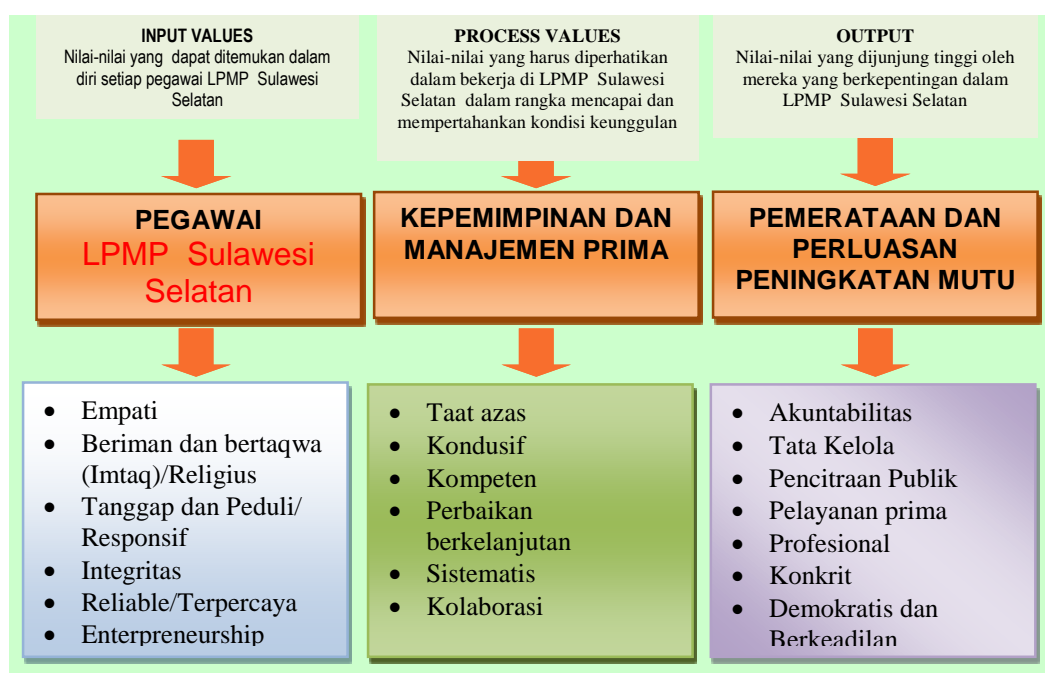
No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
			<p>yang telah dipetakan mutunya</p> <p>6. 95% SMA yang meningkat indeks efektifitasnya</p> <p>7. 100% SMK yang telah dipetakan mutunya</p> <p>8. 95% SMK yang meningkat indeks efektifitasnya</p> <p>9. 80% SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP</p> <p>10. 80% SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP</p> <p>11. 80% SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP</p> <p>12. 80% SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian</p>

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
			SNP
2		Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui pengembangan model penjaminan mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 6,6% SD yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan 2. 6,3% SMP yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan 3. 13% SMA yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan 4. 12,8% SMK yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan
3		Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang dikdasmen melalui kemitraan penjaminan mutu pendidikan	24 program kemitraan penjaminan mutu pendidikan

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
4		Tersedianya sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah	3 layanan sistem pendataan dan informasi pendidikan dasar dan menengah
5	Meningkatnya kualitas tata kelola LPMP Sulsel	Terwujudnya tata kelola LPMP Sulawesi Selatan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. 95% Data Pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan 2. Nilai minimal SAKIP LPMP Sulsel minimal 85

E. Tata Nilai

Standar moral yang menjadi prinsip kinerja seluruh warga LPMP Sulawesi Selatan berpatokan pada tata nilai sebagai berikut



Gambar 2.1. Tata Nilai LPMP Sulawesi Selatan

Nilai masukan yang tepat akan mengantisipasi karakteristik pegawai LPMP Sulawesi Selatan, yang selanjutnya akan menjalankan nilai proses manajemen organisasi dengan baik untuk meningkatkan mutu interaksi antar manusia dalam struktur organisasi LPMP Sulawesi Selatan, sehingga menghasilkan Nilai Keluaran yang akan memfokuskan LPMP Sulawesi Selatan kepada hal-hal yang diharapkan dalam pencapaian visi dan misi dengan baik. Nilai-nilai masukan (*input values*), yakni nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri setiap pegawai LPMP Sulawesi Selatan dalam rangka mencapai keunggulan. Nilai yang dimaksud dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Nilai Masukan

Komponen	Pengertian
Empati	Dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain
Beriman dan Bertaqwa	Pekerjaan menjadi suatu amanah dan ibadah, mempunyai moral dan etika, berbudi luhur, dan bermartabat

Komponen	Pengertian
Tanggap dan Peduli/Responsif	Cepat bertindak/cekatan, bermotivasi, melakukan tindakan berdasarkan azas manfaat, futuristik, adaptif
Integritas	Jujur dan dapat dipercaya, berwibawa, karismatik, inspiratif, teladan, sabar, bertanggung jawab dan memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak
Reliable/Terpercaya	Inovatif dan kreatif, cermat dan teliti, memilikisifat <i>objective</i> dan disiplin
Enterpreneurship	Visioner, intuitif, berhasil guna, berani mengambil resiko dan mengoptimalkan sumber daya yang ada

Nilai-nilai proses (*process values*), yakni nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja di LPMP Sulawesi Selatan, dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi yang diinginkan. Nilai-nilai yang dimaksud terangkum dalam tabel berikut berikut :

Tabel 2.5 Nilai Proses

Komponen	Pengertian
Taat Azas	Prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan/tugas
Kondusif	Memiliki budaya kerja yang sehat dan mandiri, transparan, komunikatif, demokratis, <i>team work</i> , <i>shared vision</i> , <i>self-belonging</i> dan loyalitas
Kompeten	Bekerja berdasarkan keahlian (<i>the right man in the right place</i>)
Perbaikan Berkelanjutan	Terus melakukan perbaikan standar dan mengikuti kecenderungan/tren perubahan sains dan teknologi
Sistematis	Runut (berurutan), efektif, efisien, dan tersistem
Kolaborasi	Membangun kemitraan dan kerja sama

Nilai-nilai keluaran (*output values*), yakni nilai-nilai yang diperhatikan oleh para *stakeholders* (Unit Utama Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Pemerintah

Daerah, DPRD, Pegawai, Donatur, Dunia Pendidikan, Masyarakat lainnya), meliputi :

Tabel 2.6 Nilai Keluaran

Komponen	Pengertian
Akuntabilitas	Dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif
Tata Kelola	Tertib administrasi/sesuai dengan prosedur dan peraturan
Pencitraan Publik	Transparan, komunikatif dan terpercaya
Pelayanan Prima	Handal dan mampu menjadi <i>one-stop service</i>
Profesional	Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dalam arti berkompetensi, menjadi teladan, terpercaya, sistematis .

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi LPMP Sulawesi Selatan tahun 2015—2019 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Ditjen Dikdasmen 2015—2019 serta hasil evaluasi capaian LPMP Sulawesi Selatan.

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah diturunkan dari arah kebijakan dan strategi nasional. Dengan mengemban tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah harus menentukan arah kebijakan sesuai dengan bidang yang dibawahinya yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan serta Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

Arah kebijakan dan strategis Dikdasmen dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Pendidikan Dasar Dan Menengah

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Pemenuhan hak terhadap pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah	1. Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan Pendidikan Dasar dan	1.1 Penyediaan bantuan untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat mengikuti Program Indonesia Pintar

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
yang berkualitas	Menengah berkualitas	<p>pada pendidikan dasar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar</p> <p>1.2. Penanganan akses pendidikan, khususnya di daerah 3T</p> <p>1.3. Penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus</p> <p>1.4. Penyediaan biaya operasional sekolah (BOS)</p> <p>1.5. Peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antar daerah dan kesenjangan gender</p> <p>1.6. Peningkatan ketersediaan Sekolah menengah di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB, terutama penambahan RKB, dan pembangunan SMP-SMA serta MTs/MA satu atap, ketersediaan SMK yang mendukung pembangunan bidang pertanian, maritim,</p>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		<p>pariwisata, industri manufaktur, dan ekonomi kreatif</p> <p>1.7. Penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas.</p>
Peningkatan pendidikan kewargaan	<p>1. Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen)</p>	<p>1.1. Penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan (PKN, IPS, [sejarah, geografi, sosiologi/antropologi], bahasa Indonesia)</p>
Peningkatan pendidikan karakter	<p>1. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi</p>	<p>1.1. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk</p>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik	<p>memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;</p> <p>1.2. Pengembangan kurikulum jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang memberi porsi yang proporsional bagi pelajaran budi pekerti untuk membina karakter dan memupuk kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan etika sosial.</p>
	2. Membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa	<p>2.1. Pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral.</p> <p>2.2. Pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pemberian bimbingan-penyuluhan dalam proses pembelajaran, untuk mendukung siswa dalam mengembangkan segenap potensi</p>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		dan kepribadian dengan sempurna.
Peningkatan kualitas pembelajaran	1. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan	<p>1.1. Pemantapan penerapan SPM untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>1.2. Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>1.3. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara bertahap jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>1.4. Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta.</p>
	2. Mengembangkan kurikulum	<p>2.1. Evaluasi kurikulum secara ketat, komprehensif dan berkelanjutan</p> <p>2.2. Pelibatan guru dan pemangku kepentingan lain untuk memberikan informasi pelaksanaan kurikulum termasuk hasil penilaian di kelas.</p> <p>2.3. Penguatan kerjasama</p>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		<p>antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran.</p> <p>2.4. Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah.</p> <p>2.5. Penyediaan dukungan materi pelatihan secara <i>online</i> untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antarguru.</p> <p>2.6. Peningkatan kompetensi kognitif siswa di bidang Matematika, Sains, dan Literasi, baik dalam UN maupun dalam tes internasional.</p> <p>2.7. Peningkatan kualitas pembelajaran Matematika, Sains, dan Literasi dengan mempertimbangkan kesetaraan hasil belajar antarjenis kelamin.</p> <p>2.8. Peningkatan kompetensi siswa sesuai dengan bakat,</p>

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		minat dan kemampuannya di bidang sains, olahraga dan seni.
Peningkatan tata kelola pendidikan	1. Meningkatkan tata kelola pendidikan dalam kerangka desentralisasi	<p>1.1. Penguatan kapasitas pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan pendidikan.</p> <p>1.2. Penguatan kemitraan antara Pusat dengan Dinas pendidikan Provinsi, dan</p>
	2. Memperkenalkan model pendanaan dan penganggaran berbasis kinerja untuk bidang pendidikan di tingkat daerah	<p>2.1. Pelaksanaan desentralisasi asimetris atau pendelegasian kewenangan kepada kabupaten/ kota dengan mempertimbangkan kapasitas daerah dalam mengelola layanan pendidikan dan pembiayaannya.</p> <p>2.2. Penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan.</p>
	3. Memperkuat Manajemen Berbasis	3.1. Penguatan MBS melalui peningkatan partisipasi seluruh

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	Sekolah (MBS)	<p>pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah.</p> <p>3.2. Peningkatan kapasitas Sekolah dalam melaksanakan MBS.</p> <p>3.3. Peningkatan kapasitas Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan MBS oleh satuan pendidikan.</p> <p>3.4. Penguatan kapasitas staf administrasi sekolah dalam pengelolaan sekolah yang transparan dan akuntabel.</p>
	4. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas	<p>4.1. Pengaturan secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu satuan pendidikan swasta dalam penyediaan akses pendidikan yang berkualitas.</p> <p>4.2. Peningkatan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan yang disediakan.</p> <p>4.3. Penegakan aturan tentang jaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan swasta.</p>
	5. Memperkuat sistem informasi	5.1. Penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	pendidikan	informasi 5.2. Peningkatan komitmen pusat dan daerah dalam penyediaan data dan informasi pendidikan 5.3. Penguatan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk mengidentifikasi penduduk sasaran layanan pendidikan.
Peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan	1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan	1.1. Memperkuat sistem penggunaan dan laporan pertanggungjawaban anggaran. 1.2. Memperkuat sistem perencanaan pendidikan dasar dan menengah melalui peningkatan/pembangunan kapasitas provinsi/kabupaten/kota
	2. Memperkuat mekanisme pembiayaan pendidikan	2.1. Peninjauan kembali aturan penggunaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

B. Strategi LPMP Sulawesi Selatan

Strategi LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2015—2019 disusun sebagai implementasi dari arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mendukung tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan

berdasarkan semangat gotong royong. Strategi yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 dan Renstra Ditjen Dikdasmen 2015-2019 serta visi, misi LPMP Sulawesi Selatan.

Kebijakan yang ditetapkan LPMP Sulawesi Selatan merupakan kebijakan strategis penjaminan mutu pendidikan dengan fokus kebijakan sebagai berikut:

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
3. Peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
4. Model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
5. Kemitraan bidang penjaminan mutu pendidikan;
6. Sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
7. Urusan administrasi kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

Untuk melaksanakan kebijakan penjaminan mutu pendidikan, diperlukan strategi yang dirumuskan dari tujuan strategis dan sasaran strategis yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Strategi untuk Mencapai Tujuan Strategis LPMP Sulawesi Selatan

Tujuan strategis	Sasaran Strategis	Strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis
Meningkatnya nilai capaian SNP pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulsel	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek Pemetaan mutu pendidikan 2. Pemetaan mutu pendidikan di seluruh jenjang Dikdasmen 3. Penyusunan rekomendasi peningkatan dan pengembangan mutu
	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan dasar dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan pemanfaatan hasil EDS secara bertahap ke seluruh jenjang pendidikan dasar dan

Tujuan strategis	Sasaran Strategis	Strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis
	menengah melalui pengembangan model penjaminan mutu pendidikan	<p>menengah</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pendampingan penyusunan dokumen mutu secara bertahap pada sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah 3. Pendampingan audit mutu internal secara bertahap pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 4. Bimtek sekolah model 5. Penetapan sekolah model berbasis kecamatan 6. Pendampingan sekolah model 7. Diseminasi sekolah model kab.kota dan provinsi
	Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang dikdasmen melalui kemitraan penjaminan mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat 2. Bimtek 3. Pendampingan 4. Monev
	Tersedianya sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan model penjaminan mutu pendidikan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi program 2. Koordinasi dan sinkronisasi program penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah

Tujuan strategis	Sasaran Strategis	Strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis
		3. Penandatanganan MoU penjaminan mutu pendidikan dengan pemerintah daerah
		1. Layanan jurnal 2. Layanan e- bulletin 3. Layanan guru bertanya LPMP menjawab 4. Layanan e-office
Meningkatnya kualitas tata kelola LPMP Sulsel	Terwujudnya tata kelola LPMP Sulawesi Selatan yang baik	Melaksanakan secara akuntabel, transparan, dan efektif dalam: a. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), b. pencapaian fisik program, dan penyerapan anggaran.

Arah kebijakan LPMP Sulawesi Selatan selanjutnya dilaksanakan melalui program dan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan periode 2015—2019. Sejalan dengan pola perencanaan pada periode 2015—2019, LPMP Sulawesi Selatan telah menggunakan struktur perencanaan dan anggaran yang terbaru. Penyesuaian dan penyempurnaan dilakukan pada struktur kinerja yang mencakup Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) LPMP Sulawesi Selatan.

Struktur Program dan penanggung jawab untuk mengelola kegiatan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Program, Kegiatan dan Penanggung Jawab

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	
		ESELON III	ESELON IV
1	Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah	Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan (PSMP)	Seksi Pemetaan Mutu Pendidikan
2	Supervisi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah	Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan (PSMP)	Seksi Supervisi Mutu Pendidikan
3	Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar	Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (FPMP)	Seksi Pendidikan Dasar
4	Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan menengah	Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (FPMP)	Seksi Pendidikan Menengah
5	Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah	Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan	Seksi Pemetaan Mutu Pendidikan Seksi Supervisi Mutu Pendidikan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	
		ESELON III	ESELON IV
		(PSMP) dan Bidang Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (FPMP)	Seksi Pendidikan Dasar Seksi Pendidikan Menengah
6	Kemitraan penjaminan mutu pendidikan	Bidang Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (FPMP)	Seksi Pendidikan Dasar dan Seksi Pendidikan Menengah
7	Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah	Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan (PSMP)	Seksi Pemetaan Mutu Pendidikan
8	Penyelenggaraan tata kelola kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan	Bagian Umum	Subag Tata Laksana dan Kepegawaian Subag Perencanaan dan Penganggaran Subag Tata Usaha dan Rumah Tangga

Penerapan strategi yang ditetapkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan LPMP Sulawesi Selatan tidak terlepas dari tata nilai yang menjadi standar moral dan kinerja pegawai LPMP Sulawesi Selatan dalam memberikan layanan prima penjaminan mutu pendidikan di provinsi Sulawesi Selatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan LPMP Sulawesi Selatan untuk pemenuhan visi sesuai misi yang diemban akan diwujudkan dalam kerangka kelembagaan yang kuat dan sistematis.

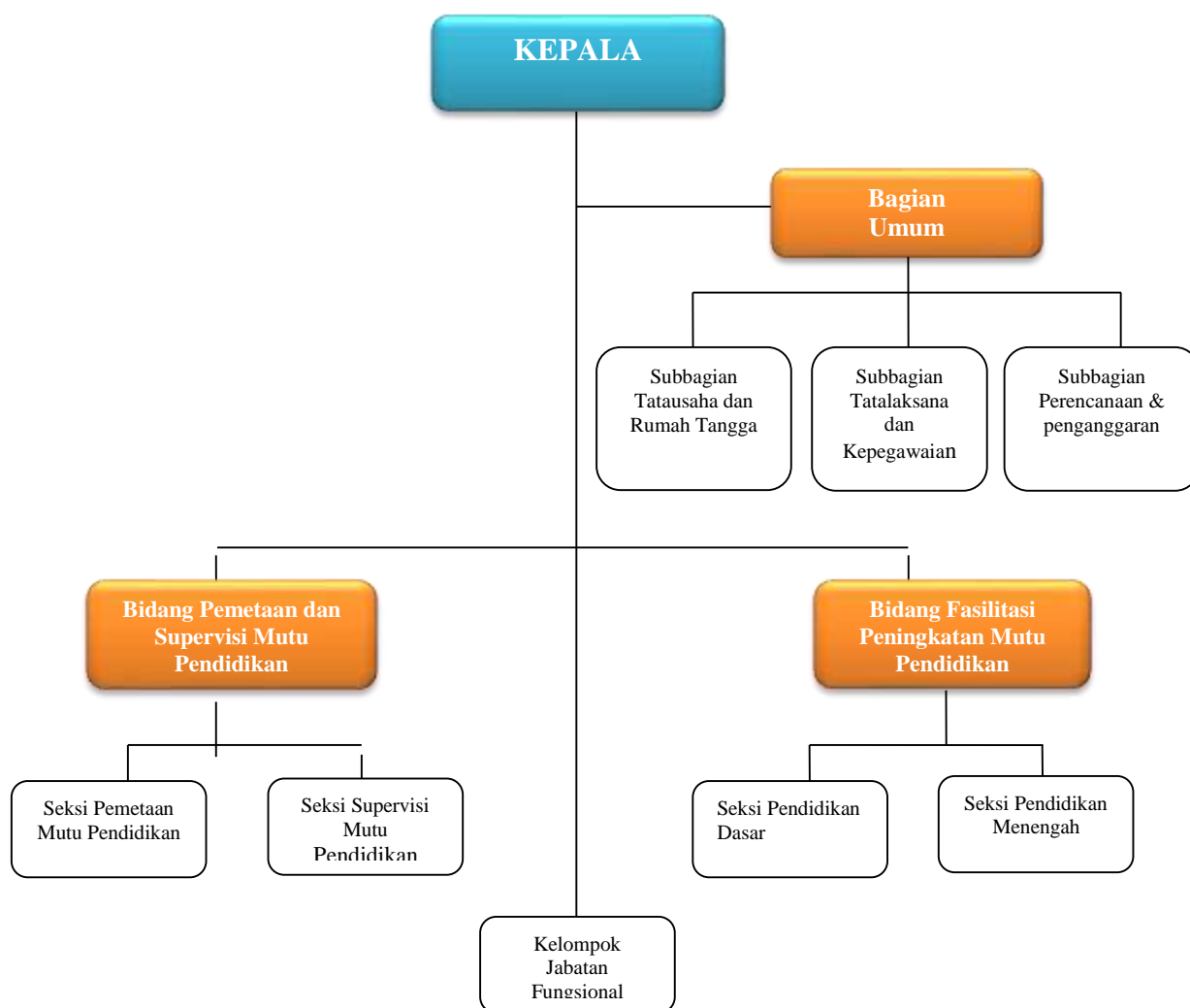
C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan adalah perangkat LPMP Sulawesi Selatan yang meliputi struktur organisasi dan proses bisnis yang menggambarkan alur aktivitas LPMP Sulawesi Selatan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Kerangka kelembagaan ini disusun dengan tujuan :

1. meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan antarunit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk pencapaian dan visi/misi LPMP Sulawesi Selatan.;
2. membangun sistem internal yang dapat menjamin keterlaksanaan setiap program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya LPMP Sulawesi Selatan.

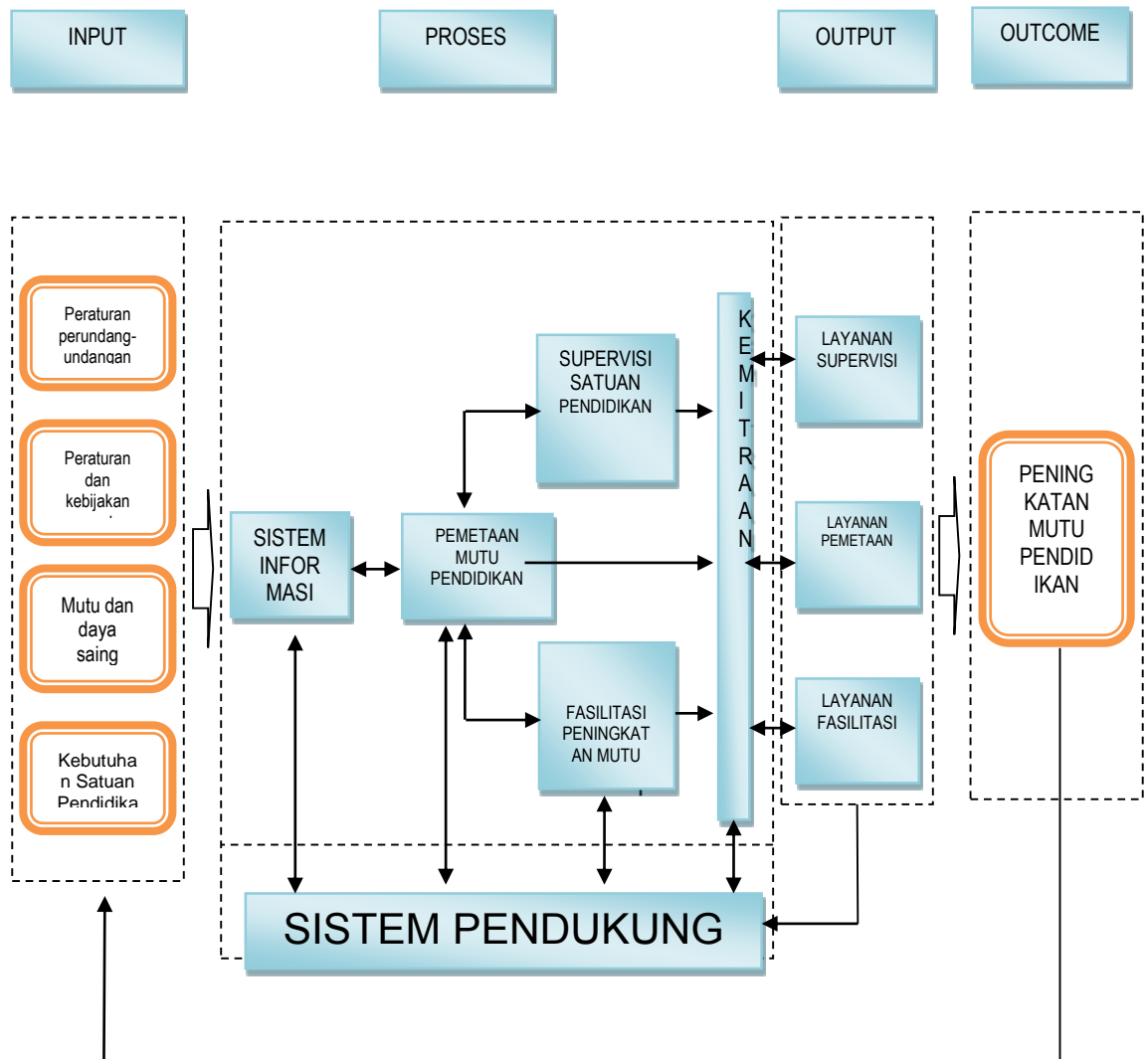
Pada periode pembangunan 2015—2019, LPMP Sulawesi Selatan akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan.

Struktur organisasi LPMP Sulawesi Selatan 2015-2019 ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 3.1. Struktur Organisasi LPMP Sulawesi Selatan

Proses bisnis yang akan dilaksanakan LPMP Sulawesi Selatan dalam aktivitas penjaminan mutu pendidikan ditetapkan sebagai berikut :



Gambar 3.2. Proses Bisnis LPMP Sulawesi Selatan

BAB IV TARGET DAN INDIKATOR KINERJA LPMP SULAWESI SELATAN

A. TARGET KINERJA

Target Kinerja merupakan salah satu pentahapan yang sangat menentukan keberhasilan lembaga dalam mewujudkan tercapainya indikator kinerja sasaran dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan 8 (delapan) sasaran program untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran (IKS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keberhasilan Sasaran Program tersebut ditentukan oleh ketercapaian Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target kinerja LPMP Sulawesi Selatan mengacu pada target capaian kinerja sesuai yang tertuang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang secara eksplisit dilegalkan dalam Permendikbud 28 tahun 2015 tentang Rencana Starategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Target kinerja LPMP Sulawesi Selatan sesuai yang diamanahkan dalam bentuk ketercapaian indikator kinerja kegiatan sesuai indikator kinerja program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Target Kinerja

NO	INDIKATOR	SATU AN	KOND ISI AWAL	TARGET CAPAIAN				
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya Pejaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan							
	Persentase SD yang telah dipetakan mutunya	%	90.15	90.15	100	100	100	100
	Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	5	15	40	75	95

NO	INDIKATOR	SATU AN	KOND ISI AWAL	TARGET CAPAIAN				
				2015	2016	2017	2018	2019
	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya	%	71.48	71.49	100	100	100	100
	Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	20	35	60	80	95
	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya	%	71.41	71.41	100	100	100	100
	Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	20	35	60	80	95
	Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya	%	59.60	59.60	65	80	90	100
	Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	10	25	45	70	95
	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	16.8	25	40	60	80
	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	16.8	25	40	60	80
	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	16.8	25	40	60	80
	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam	%	0	16.8	25	40	60	80

NO	INDIKATOR	SATU AN	KOND ISI AWAL	TARGET CAPAIAN				
				2015	2016	2017	2018	2019
	pencapaian SNP							
2	Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan							
	Persentase SD yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan	%	0	0	4.8	5.9	6.3	6.6
	Persentase SMP yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan	%	0	0	1.9	3.3	4.8	6.3
	Persentase SMA yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan	%	0	0	4.6	4.6	8.8	13.0
	Persentase SMK yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan	%	0	0	4.2	4.2	8.4	12.8
3	Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Kemitraan Penjaminan Mutu Pendidikan							

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN				
				2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah program kemitraan penjaminan mutu pendidikan	Keg	1	6	10	14	18	24
4	Tersedianya Sistem Informasi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah							
	Jumlah layanan sistem pendataan dan informasi pendidikan dasar dan menengah	Media Informasi	1	1	1	2	2	3
5	Terwujudnya Tata Kelola LPMP Sulawesi Selatan yang Baik							
	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan dan terbaru	%	80	85	87	89	92	95
	Nilai minimal SAKIP LPMP Sulawesi Selatan	Skor				66,6	76	85

B. KERANGKA PENDANAAN

Perkiraan pendanaan pendidikan dalam kurun waktu 2015-2019 mengacu pada amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas serta kebijakan Penjaminan Mutu yang ada pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam Renstra Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan telah

ditetapkan visi, misi dan tujuan organisasi yang akan menentukan arah kebijakan dalam menyusun program sesuai dengan tugas dan fungsi LPMP Sulawesi Selatan.

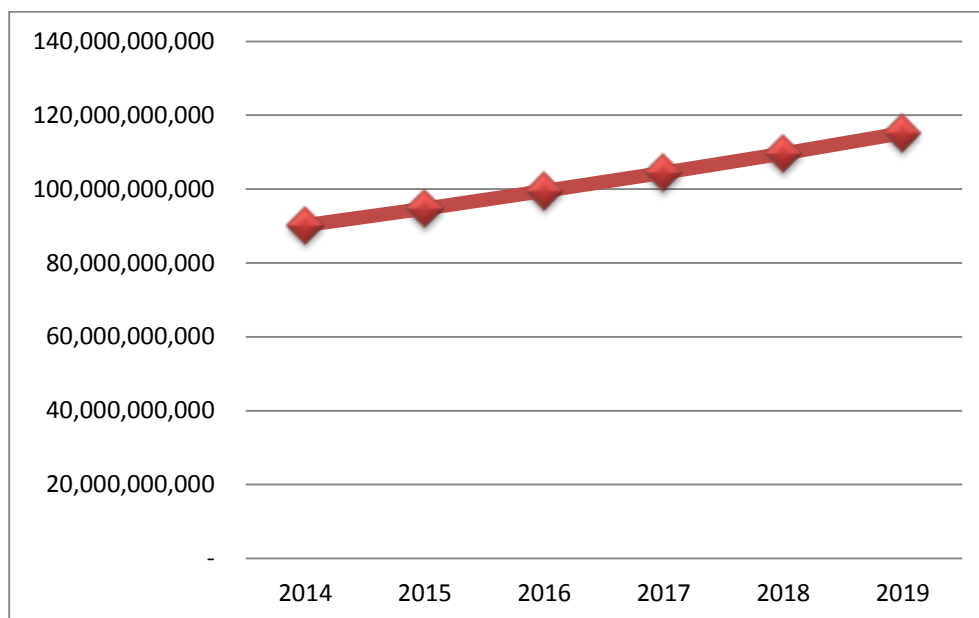
Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2015 diperkirakan berkisar di angka 4,73% dan untuk beberapa tahun selanjutnya diperkirakan mencapai 6,5% per tahun.

Total pagu anggaran LPMP Sulawesi Selatan tahun 2014 adalah Rp.90.219.256.000,- dan akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan kebutuhan lembaga maupun bertambahnya sasaran program yang ingin dicapai sehingga menurut perhitungan pertumbuhan ekonomi dan perubahan inflasi setiap tahun, maka dapat kami peroleh perkiraan kebutuhan anggaran seperti ditunjukkan pada tabel dan grafik berikut:

**Tabel 4.2. Proyeksi Kebutuhan Pendanaan LPMP Sulawesi Selatan
Tahun 2015-2019**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Pagu Anggaran	94,730,218	99,466,729	104,440,066	109,662,069	115,145,173

* dalam ribuan Rupiah



**Gambar 4.1. Proyeksi Kebutuhan Pendanaan LPMP Sulawesi Selatan
Tahun 2015-2019**

Perkiraan kebutuhan anggaran Kemendikbud selama periode 2015—2019 adalah sebesar Rp. 523.444.255.000,-. Untuk mencapai sasaran Renstra LPMP Sulawesi Selatan diperlukan peran serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, masyarakat, orang tua, dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pemenuhan pendanaan pendidikan di Sulawesi Selatan.

Berikut disajikan kerangka pendanaan untuk masing-masing indikator kinerja:

Tabel 4.3. Rencana Pendanaan Berdasarkan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Pendanaan (dalam milyar)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Persentase SD yang telah dipetakan mutunya	3.36	3.53	3.71	3.89	4.09
	Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya					
	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya	0.85	0.90	0.94	0.99	1.04

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Pendanaan (dalam milyar)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya					
	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya	0.28	0.30	0.31	0.33	0.35
	Persentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya					
	Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya	0.24	0.25	0.26	0.27	0.29
	Persentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya					
	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	23.54	24.72	25.95	27.25	28.61
	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	5.97	6.27	6.58	6.91	7.25
	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	1.99	2.09	2.19	2.30	2.42
	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	1.66	1.74	1.83	1.92	2.02
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah	Persentase SD yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan	6.73	7.06	7.42	7.79	8.18
	Persentase SMP yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan	1.71	1.79	1.88	1.97	2.07

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Pendanaan (dalam milyar)				
		2015	2016	2017	2018	2019
melalui pengembangan model penjaminan mutu pendidikan	Persentase SMA yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan	0.57	0.60	0.63	0.66	0.69
	Persentase SMK yang menerapkan model penjaminan mutu pendidikan	0.47	0.50	0.52	0.55	0.58
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui kemitraan penjaminan mutu pendidikan	Jumlah program kemitraan penjaminan mutu pendidikan	4.74	4.97	5.22	5.48	5.76
Tersedianya sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah	Jumlah layanan sistem pendataan dan informasi pendidikan dasar dan menengah	4.74	4.97	5.22	5.48	5.76
Terwujudnya tata kelola LPMP Sulawesi Selatan yang baik	Data Pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan	9.47	9.95	10.44	10.97	11.51
	Nilai minimal SAKIP LPMP SulSel	28.42	29.84	31.33	32.90	34.54

C. SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah mewajibkan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk mengendalikan seluruh kegiatan dengan menyelenggarakan sistem

pengendalian intern. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sistem pemantauan yang dilakukan LPMP Sulawesi Selatan merujuk pada salah satu unsur dalam penyelenggaraan SPIP, yaitu pemantauan dan pengendalian intern. Sedangkan evaluasi atas pelaksanaan program lembaga merujuk pada hasil audit dari institusi terkait, antara lain Inspektorat Jenderal Kemendikbud serta hasil penilaian SAKIP dari institusi yang berwenang melakukan penilaian Sistem AKIP UPT, yaitu Biro Keuangan Kemendikbud.

1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra LPMP Sulawesi Selatan. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2015—2019 dengan hasil yang dicapai pada tahun pencapaian Renstra.

2. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

1. Organisasi menerapkan proses sistematis dalam menentukan “apa” dan “bagaimana” melakukan pemantauan.
2. Pemantauan mempertimbangkan bagaimana keseluruhan pengendalian intern mengelola risiko, bukan bagaimana setiap kegiatan pengendalian beroperasi dalam sistem tertutup.
3. Pimpinan mempunyai peran penting dalam pemantauan pengendalian intern (khususnya pengendalian terkait dengan “*tone of the top*”) dan dalam rangka memitigasi risiko dari “*override*” oleh pimpinan.
4. Pemahaman dasar atas desain dan efektivitas operasi suatu pengendalian intern bermanfaat sebagai titik tolak yang baik dalam mengimplementasikan prosedur pemantauan yang efektif dan efisien.
5. Menetapkan apa yang harus dipantau dipengaruhi oleh:
 - a. Dampak dan probabilitas dari risiko;
 - b. Sifat dari pengendalian yang dirancang untuk mengelola atau memitigasi risiko; dan

- c. Informasi yang diperlukan untuk menyimpulkan apakah pengendalian yang diterapkan telah efektif.
6. Organisasi harus mempertimbangkan untuk menggunakan pemantauan berkelanjutan, jika memungkinkan.
7. Pemantauan yang efektif didasarkan pada informasi tentang pengendalian yang berjalan atas elemen pengendalian operasi, berdasarkan evaluasi oleh pihak yang kompeten dan independen.
8. Pimpinan harus menggunakan pertimbangan yang logik untuk melakukan pemantauan.
9. Pemantauan mencakup penggunaan informasi langsung dan tidak langsung. Penggunaan informasi tidak langsung hanya untuk periode tertentu.
10. Kelemahan pengendalian yang diidentifikasi harus:
 - a. Dievaluasi dampaknya;
 - b. Dilaporkan; dan
 - c. Dipertimbangkan tindakan perbaikannya.

3. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang direncanakan berjalan di lingkungan LPMP Sulawesi Selatan meliputi:

- a. Pemantauan dan pengendalian program triwulanan dalam bentuk Rapat Manajemen;
- b. Pemeriksaan dalam kerangka pembinaan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemendikbud dalam program audit semester;
- c. Evaluasi kinerja tahunan melalui Sistem AKIP yang dilakukan oleh Biro Keuangan Kemendikbud; dan
- d. Evaluasi akhir masa Renstra yang disusun dalam suatu laporan kinerja yang disampaikan kepada Unit Utama Pembina, yaitu Ditjen Dikdasmen Kemendikbud.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis LPMP Sulawesi Selatan tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, kebijakan, tujuan strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dijabarkan atau dilakukan pembabakan ke dalam sasaran kegiatan tahunan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yaitu, tahun 2015 sampai 2019.

Di dalam Rencana Strategis secara sistematis diuraikan mengenai tujuan strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang semuanya bermuara kepada pencapaian visi sebagai amanat yang harus diemban oleh LPMP Sulawesi Selatan pada kurun waktu 2015-2019. Secara operasional kegiatan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dibagi ke dalam kegiatan-kegiatan (1) Pemetaan mutu pendidikan; (2) Supervisi dalam pencapaian standar nasional pendidikan; (3) Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan; yang terintegrasi dalam satu sistem informasi yang dikelola dan dikembangkan dalam pemberian layanan penjaminan mutu pendidikan.

Seluruh kegiatan LPMP Sulawesi Selatan harus tetap terarah dan terencana, baik dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja, serta tetap efisien dalam pelaksanaannya baik dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun aspek realisasi anggaran. Hak terhadap pelayanan penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas harus dipenuhi. Kualitas layanan penjaminan mutu pendidikan harus ditingkatkan. Peningkatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan perlu diupayakan dengan optimal. Rencana strategis LPMP Sulawesi Selatan tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan arah pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan kelembagaan di LPMP Sulawesi Selatan untuk memastikan arah kegiatan dan kebijakan pengelolaan LPMP Sulawesi Selatan selaras dengan arah kebijakan

dan pengelolaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)
SULAWESI SELATAN**

Jalan Andi Pangerang Petta Rani, Makassar, Sulawesi Selatan

Telepon: (0411)873565, 873513, Fax: (0411)873513

Laman: lpmpsulsel.kemdikbud.go.id

Surel: lpmp.sulsel@kemdikbud.go.id